

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gerakan Sosial

Definisi dari gerakan sosial merupakan suatu keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga (noninstitutionalized), dilakukan sekelompok orang untuk menghalangi atau memajukan perubahan di dalam sebuah tatanan masyarakat. Tindakan tak melembaga (institutionalized) mempunyai makna yaitu mereka tidak tergolong atau tidak diakui sebagai suatu yang berlaku secara luas, umum dan sah di dalam sebuah kesatuan masyarakat. Menurut pendukung atau yang terlibat gerakan sosial, gerakan sosial dilihat sebagai sebuah upaya yang positif. Adanya kesepakatan merupakan salah satu dari beberapa karakteristik yang menjadikan sebuah gerakan yang dilakukan berbeda dengan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.¹²

Anthony Giddens dalam mendefinisikan gerakan sosial bahwa sebagai kelompok orang yang terlibat dalam mencari penyelesaian atau untuk menghambat suatu proses perubahan sosial, Gerakan sosial biasanya muncul tidak lama setelah keresahan sosial terjadi.¹³ Dalam analisis teori gerakan sosial Anthony Giddens menegaskan bahwa gerakan sosial adalah upaya atau usaha kolektif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga yang mapan.

¹² Robert Mirel , Teori Pergerakan Sosial (Jakarta: Resist Book, 2004), hlm 7.

¹³ Sri Ayu Astuti, Media Sosial Sebagai Ruang Publik Antara Netiket dan Netizen, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013), hlm 208.

Donatella Della Porta dan Mario Diani membagi organisasi gerakan sosial ke dalam dua golongan, yakni gerakan sosial yang bekerja di ranah profesional dan organisasi gerakan sosial partisipatif. Dijelaskan bahwa organisasi gerakan sosial partisipatif sebagai organisasi yang tidak memiliki unsur profesional di dalamnya, karena terdapat struktur formal dan sistem manajemen yang memiliki kecakapan dalam hal teknis untuk keperluan gerakan, selaknyannya dalam hal ini seperti pada LSM.¹⁴ Organisasi Gerakan Sosial Partisipatif biasa lebih bersifat cair dan tidak mempunyai struktur formal dan manajemen. Misalnya dapat dilihat pada organisasi massa, kelompok buruh, tani pelayan dan kelompok-kelompok lain sebagainya.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gerakan bersama atau kolektif yang dilakukan secara masif untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara melakukan upaya tertentu untuk kepentingan bersama-bersama.

Rajendra Singh membagi gerakan sosial dalam beberapa bagian, yakni:¹⁵

1. Klasik (Classical): Gerakan Sosial dalam perspektif klasik ini meliputi sebagian besar studi-studi tentang perilaku kolektif dari kerumunan, kerusuhan, dan kelompok pemberontak.

¹⁴ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction 2nd edition* (Malden USA: Blackwell Publishing, 2006), 145.

¹⁵ Rejedra Singh, *Gerakan Sosial Baru*, terj. Eko P Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, 2010), 111.

2. Neo-klasik (*The Neo-Classical*) masih dikaitkan dengan tradisi utama dalam studi-studi Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movements*) serta pada umumnya tulisan-tulisan tradisi neo-klasik banyak dipublikasikan setelah era tahun 1950-an.
3. Kontemporer (Contemporary): dikaitkan dengan era Gerakan Sosial Baru (New Social Movement). Studi-studi mengenai diskursus ini banyak dipelajari oleh masyarakat di Amerika dan Eropa pada tahun 1960-an dan 1970-an. Di era itu gerakan sosial muncul dengan skala yang lebih besar dengan memprotes isu-isu mendasar mengenai humanis, kultural dan non-materialistik.

B. Gerakan Sosial Baru

Pada abad ke 20 muncul gerakan dan perlawanan terhadap dominasi politik yang lebih variatif dan kompleks dengan intensitas semakin bertambah. Muncul gerakan memperjuangkan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1955-1968, setelah itu muncul banyak gerakan yang memperjuangkan anti perang, lingkungan, feminisme dan lain sebagainya.¹⁶

Gerakan feminisme muncul tercatat dan semakin menggeliat setelah Deklarasi HAM oleh PBB pada tahun 1984.¹⁷ Gerakan anti perang juga terjadi pada tahun 1960an di Amerika.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 60.

Perkembangan studi Gerakan Sosial memasuki era baru pada periode 1960 an di Amerika dan Eropa Barat. Teori Gerakan Sosial Baru memiliki beberapa ciri utama yang pertama, ia menempatkan aksi gerakan sosial menjadi suatu aksi kolektif yang memiliki nilai positif dan rasional. Kedua, mengoreksi dan mengkonsepkan kembali teori-teori gerakan sosial yang jauh sebelumnya sudah ada, misalnya teori eksploitasi kelas oleh Karl Marx menjadi teori keluhan yang lebih cocok digunakan di era kontemporer, hal ini menjelaskan bahwa aksi-aksi kolektif tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas terhadap buruh oleh pemilik alat produk. Ketiga, kajian gerakan sosial kian beraneka ragam karena semakin banyaknya praktek gerakan dan studi gerakan sosial di luar wilayah Amerika dan Eropa. Keempat, Gerakan Sosial Baru dapat dengan rinci mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi berkembangnya sebuah gerakan, kekuatan atau kelemahan dan keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu gerakan sosial.¹⁸

Gerakan Sosial Baru secara esensial bersifat universal, yang mana diarahkan memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan Gerakan Sosial Lama, maka model gerakan sosial baru tidak terjebak pada diskursus ideologi seperti anti kapitalisme (*anti capitalism*), revolusi kelas (*class revolution*) dan perjuangan kelas (*class struggle*).¹⁹

Sementara itu Larana, Johnston dan Gusfield memaparkan mengenai karakteristik gerakan sosial baru atau New Sosial Movement,

¹⁸Ibid., 25.

¹⁹ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), 124.

yakni:

1. Pertama, New Social Movements (NSMs) tidak berhubungan dengan peran struktural dari partisipan (*participants*) gerakan. Kecenderungan basis sosial dari *New Social Movements* (NSMs) adalah bersifat melampaui struktur kelas (*class structure*). Latar belakang dari partisipan ditemukan menyebar dalam berbagai status sosial, seperti pemuda (*youth*), gender (*gender*), orientasi seksual (*sexual orientation*), atau kalangan profesional (*professional*), yang tidak berhubungan dengan penjelasan struktural (*structural explanations*).
2. Kedua, karakteristik ideologi dari *New Social Movements* (NSMs) bertolak belakang dengan ideologi gerakan kelas pekerja (*the working class movements*) dan konsepsi ideologi Marxist sebagai elemen penyatuan dan totalitas untuk tindakan kolektif (*collective action*). Khususnya di Eropa dan juga di Amerika Serikat, gerakan ditandai oleh karakteristik ideologi: *conservative* atau *liberal*, *right* atau *left*, *capitalist* atau *socialist*. Pandangan Marxis lebih dominan di Eropa daripada di Amerika, mengarahkan paradigma untuk membentuk persepsi tentang tindakan baik borjuis atau proletar. Memberikan batasan terhadap *New Social Movements* (NSMs) akan lebih sulit karena ide-ide dan nilai-nilainya lebih plural, cenderung memiliki orientasi yang pragmatis, dan berupaya untuk melakukan reformasi kelembagaan dimana semakin terbukanya sistem bagi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan.

3. Ketiga, seringkali menyangkut dimensi identitas baru. Faktor mobilisasi lebih cenderung mengarah kepada isu-isu simbolis dan kultural yang dikaitkan dengan isu-isu tentang identitas daripada keluhan-keluhan ekonomi sebagaimana menandai gerakan kelas pekerja.
4. Keempat, menyangkut aspek-aspek personal dan erat dengan kehidupan manusia. Gerakan-gerakan yang berfokus dalam hak-hak kaum gay dan aborsi, gerakan kesehatan termasuk pengobatan alternatif dan anti merokok, gerakan transformasi diri dan usia baru (*new age and transformation movements*), dan gerakan kaum wanita, semuanya bertujuan untuk merubah perilaku fisik dan seksual. Gerakan juga diperluas ke dalam arena kehidupan sehari-hari, seperti: bagaimana kita makan, berpakaian, dan santai; bagaimana kita mencintai, mengatasi masalah pribadi, atau perencanaan karier.
5. Kelima, ciri-ciri umum lainnya dari *New Social Movements* (NSMs) adalah dalam menggunakan taktik mobilisasi terhadap gangguan dan hambatan yang berbeda dari praktek mobilisasi gerakan kelas pekerja (*working-class movement*). *New Social Movements* (NSMs) menggunakan pola mobilisasi baru yang diwarnai oleh anti-kekerasan dan pembangkangan sipil (*nonviolence and civil disobedience*).

Pernyataan Doug MCA dan dikutip dari buku Sukoharjo, gerakan sosial mempunyai dinamika di dalam kehidupannya, yang diciptakan serta tumbuh akan mencapai sukses atau bisa gagal dan bahkan bisa bubar atau

terhenti eksistensinya²⁰. Terdapat tiga faktor yang bisa mempengaruhi suatu dinamika dari gerakan sosial:

1. Kesempatan atau peluang politik. Kesempatan atau peluang politik bisa muncul jika terdapat suatu kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai harapan masyarakat, hal itu bisa terjadi jika terdapat perilaku yang menyimpang dilakukan oleh pemerintah didasari oleh kepentingan suatu kelompok saja. Kebijakan pemerintah yang dilakukan seperti itu akan memberikan sebuah peluang akan hadirnya gerakan sosial melalui kemampuan untuk memberikan peluang bagi terjadinya isu serta konsekuensi khusus tertentu yang akan ditimbulkan.
2. Pembingkaihan. Menurut David Snow proses pembingkaihan bisa diartikan merupakan sebuah upaya strategis yang secara sadar dilakukan oleh kelompok sebagai pembentuk pemahaman secara bersama tentang diri mereka serta dunia yang akan mendorong aksi kolektif.
3. Mobilisasi. Dalam gerakan sosial dapat dikatakan memiliki kekuatan jika gerakan sosial memiliki sebuah koneksi yang banyak selama gerakan itu bisa membangun serta melakukan komunikasi dengan beberapa pihak luar. Kekuatan gerakan sosial bisa saja menjadi kuat jika terdapat kelompok elit ataupun intelektual, seperti aktivis atau LSM. Kelompok elit akan mengembangkan aksi dengan beberapa organisasi luar yang luas serta akan berorientasi

²⁰Suharko, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia* (Malang: AVERROES PRESS, 2006), hlm.5.

dengan massa.

Sementara itu Tarrow juga menjelaskan mengenai properti-properti dasar yang dilakukan dalam menjalankan sebuah gerakan sosial. Dimana properti-properti ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Properti ini juga menggambarkan bagaimana bentuk praktik gerakan sosial alam melakukan perlawanannya sehingga proses identifikasinya haruslah dilakukan dengan seksama. Properti-properti dasar yang dimaksud adalah:

1. Tantangan kolektif (*collective challenge*), tantangan bersama ini ditandandai dengan adanya ancaman direspon kemudian dengan sebuah perlawanan kolektif dan aksi langsung. Tantangan kolektif bisa juga mewujud dalam berbagai bentuk, bisa melalui simbol maupun tindakan yang mewujud berupa perlawanan. Kekuatan inilah yang menjadi pondasi untuk fokus dalam praktik gerakan sosial.
2. Tujuan bersama (*common purpose*), tindakan yang diambil dalam sebuah komunitas bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan. Pada umumnya alasan yang digunakan untuk melakukan praktek ini adalah untuk menegaskan sebuah nilai atau bahkan untuk menentang pihak lawan.
3. Identitas bersama dan Solidaritas, pemeliharaan nilai-nilai atau konsensus dilakukan dengan dasar kepentingan bersama guna menggerakkan potensi yang dimiliki sebuah kelompok atau komunitas sehingga dapat tercipta sebuah perubahan. Selain

cara tersebut sebuah penggalian mendalam dari stand poin perseorangan dari komunitas yang menggali perasaan atau kebutuhan akan juga bisa menjadikan perubahan.

4. Memelihara sebuah politik perlawanan, politik perlawanan yang dimaksud adalah menjaga semangat untuk terus melakukan perlawanan terhadap sebuah ketidakadilan yang terjadi dengan didasari tujuan kolektif dan identitas bersama. Bentuk politik perlawanan yang didasari dual hal tersebut haruslah dipraktekkan secara kolektif sebab jika dilakukan secara individu akan berakibat pada lemahnya perlawanan yang dilakukan itu sendiri.

Pada dasarnya gerakan sosial merupakan hal penting sebagai awal pembentukan sebuah sikap, dalam hal ini pembentukan sikap akan membawa dampak disaat muncul isu-isu publik yang akan berpengaruh pada pembentukan sebuah dasar atau rumusan kebijakan sosial. Dalam konteks politik gerakan sosial dapat mempengaruhi sebuah perubahan dalam setiap individu.

C. Konflik Sosial

Dahrendorf memang pada mulanya sangat dipengaruhi oleh teoritisi fungsionalisme struktural. Implikasi dari hal tersebut adalah adanya sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama sukarela atau konsensus. Namun, berbeda pula jika dilihat dari teoritisi konflik. Teoritisi konflik melihat bahwa masyarakat disatukan oleh ketidak bebasan yang dipaksakan, atau singkatnya disatukan oleh tekanan diluar mereka. Dengan

demikian terdapat sebuah posisi tertentu dalam masyarakat didasari oleh kekuasaan dan otoritas guna mengisi atau mendelegasikannya demi kepentingan individu maupun kelompok²¹.

Konflik yang timbul pada masyarakat terjadi karena timpangnya kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh masyarakat. Secara tersirat adanya otoritas yang dimiliki menghasilkan terbentuknya superordinasi dan subordinasi.²²

Otoritas sendiri didefinisikan Dahrendorf sebagai sebuah hak mutlak yang dimiliki oleh individu dalam struktur atau kelompok tertentu yang tidak bisa ditentang serta sah untuk dipatuhi.²³

Adanya konflik dalam masyarakat juga disebabkan oleh adanya kepentingan yang dilakukan oleh kelompok yang berkepentingan. Sedangkan kepentingan yang ada dalam sebuah masyarakat terbagi menjadi dua:²⁴

1. Kepentingan laten, adalah kepentingan yang dimiliki oleh kelompok belum disadari oleh anggota kelompok.
2. Kepentingan manifest, adalah kepentingan yang sudah mampu dimengerti guna diperjuangkan oleh anggota kelompok.

Lebih jauh lagi kepentingan-kepentingan yang diakomodir oleh kelompok ini mengimplikasikan terbentuknya dua kelompok kepentingan, yakni:

²¹ George Ritzer, Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam (Jakarta: Kencana, 2004), 154.

²² Ibid., 167.

²³ Margaret. M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994) 133.

²⁴ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (London: Routledge, 1959).

1. Kelompok Semu (quasi), adalah tidak mempunya individu menyadari kepentingan bersama dalam kelompok.
2. Kelompok Kepentingan, adalah dimana individu sudah mampu menyadari dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Adanya konflik sosial mensyaratkan tiga faktor:²⁵

1. Teknis, yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pendiri dan nilai-nilai yang diperjuangkan.
2. Politik, kemauan dan kesadaran dalam mengekspresikan dan berserikat dalam sebuah negara.
3. Sosial, adalah karakteristik anggota kelompok yang mencakup kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan konsentrasi juga sifat homogenitas anggota.

D. Aset Budaya

Haralambos dan Holborn mengkategorikan budaya sebagai suatu keseluruhan tentang cara hidup didalam kelompok masyarakat tertentu. Selain itu menegaskan budaya adalah sesuatu yang dipelajari serta dibagi ataupun digunakan bersama oleh masyarakat²⁶. Masyarakat dari kesatuan manusia merupakan pembentuk suatu budaya yang menghasilkan banyak produk, yang akan menjadi sebuah identitas tersebut untuk kebudayaan yang dihasilkan. Bisa diartikan bahwa kebudayaan adalah semua tindakan yang dihasilkan dari kehidupan kelompok atau kebersamaan.

Dalam pertumbuhan budaya bertepatan dengan proses timbulnya apresiasi kelompok dalam suatu kebutuhan untuk mengkonservasi aset

²⁵ Ibid.,

²⁶ Haralambos, Michael, Martin Holborn, and Robin Heald, *Sociology, Themes and Perspective* (London: Harper Collins Publishers Limited, 2000), 884.

budaya yang mulai berkurang. Aset budaya bisa dikategorikan melingkupi lingkungan budaya, lingkungan alam, tempat bersejarah, lingkungan yang dibangun, serta dibangunnya aset.

Aset bersejarah yang memiliki nilai historis yang patut dijaga kelestariannya. Aset bersejarah tidak akan terlepas dengan tata kehidupan dan awal mula keberadaan masa kini yang diawali kisah-kisah sejarah di masa lampau, kemudian akan meninggalkan bukti sejarah yang bernilai bagi kehidupan. Dalam proses perlindungan dari kekayaan aset budaya yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab semua warga negara serta bangsa Indonesia. Tetapi dalam hal ini peranan serta tingkatan akan pertanggungjawaban dari berbagai komponen masyarakat bangsa secara umum tidaklah sama. Terdapat tanggung jawab yang muncul dari hati serta keikhlasan masyarakat setempat atau pemangku (sumber) dari aset budaya tradisional, ada juga tanggung jawab para pegiat dan pelaku ekspresi suatu aset budaya, serta yang terpenting ada peranan nyata dari tanggung jawab dari sektor pemerintah.

Kategori penggunaan aset bersejarah berpengaruh pada penilaian aset serta pengukuran dari aset itu sendiri. Aset bersejarah dikategorikan menjadi 2 kategori berdasarkan fungsi penggunaan praktek sehari-hari, yaitu²⁷:

1. Aset bersejarah untuk kegiatan operasional

Operational heritage assets PSAP 07 – 10 (Par. 70) menjelaskan bahwa beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya

²⁷ Kementerian Keuangan, *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2015)

kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Untuk contoh nyata di provinsi Aceh misalnya, aset bersejarah digunakan sebagai tempat ibadah. Contoh: Mesjid Raya Baiturrahman, jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap.

2. Aset bersejarah tidak untuk kegiatan operasional/*non operational heritage assets*

Aset jenis ini merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda.

Menurut IPSAS 17, Jenis non-operational heritage assets dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan bersejarah (Cultural Heritage Assets)
- b. Karya seni (Collection Type Heritage Assets)
- c. Situs-situs purbakala atau landscape (Natural Heritage Assets)

Contohnya seperti makam yang mempunyai nilai budaya yang merupakan identitas asal-usul dari suatu daerah. Seperti makam yang dipertahankan oleh Komunitas (FPR) Forum Pojok Rembuk.